

Wali Kota Yang Dirindukan

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

Ekspektasi (terhadap wali kota) akan terwujud ketika partisipasi masyarakat sebagai pemilih semakin cerdas menentukan wali kotanya

Kota Medan tercatat sebagai salah satu kota di Sumatera Utara, turut menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak Desember 2015. Masyarakat-pun gonjang ganjing membicarakan hal itu, mengidentifikasi putra daerah terbaik memimpin kota ini. Mulai dari warung kopi, lobby hotel, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik serta lainnya. Substansi dialog berkuat kepada adanya kecenderungan dukungan massa ingin mempertahankan kandidatnya, berupaya menggantikan kelompok elit yang berkuasa atas tuntutan masyarakat.

Secara politis, kepemimpinan daerah seperti kota Medan adalah suatu yang vital. Kepemimpinan selalu terkait dengan kebutuhan masyarakat-daerah, karena ini menentukan arah perubahan dan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi wali kota merupakan urat nadi menggerakkan maju mundurnya kota ini. Pada dimensi lain, kepemimpinan juga kebutuhan dari tuntutan demokrasi dengan terlibatnya partisipasi masyarakat menentukan pemimpin dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Demokrasi terlihat baik manakala adanya akses masyarakat menentukan pemimpinnya dan seberapa besar peranan masyarakat menentukan kebijakan publiknya. Sulit dibayangkan sebuah daerah tanpa pemimpin, pastilah autopilot, berjalan sendiri secara otomatis tanpa adanya yang mengendalikannya. Semuanya membutuhkan sentuhan dari tangan sang wali kota. Kewenangan yang mengatur dan menjalankan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan, supaya lebih terarah dan tidak *chaos* antara pemerintah kota dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat.

Apa yang sudah dilakukan para wali kota sebelumnya, merupakan pencapaian yang harus diapresiasi. Kita turut menikmati yang telah mereka lakukan untuk kota Medan. Namun bukan berarti sudah sampai pada titik pencapaian maksimal, apalagi setiap pencapaian keberhasilan diukur dengan teori dan indikatornya masing-masing. Kita harus sadari pula, tidak ada pemimpin sempurna, namun segala kekurangannya menjadi rekaman sejarah untuk ditingkatkan. Perlu inspirasi lebih berkembang, semangat menggerakkan lebih jauh dan mobilisasi terarah terhadap manajemen pemerintahan yang dibutuhkan daerah dan masyarakat kota ini. Atas dasar itu berbagai keinginan dan harapan menuju arah peruba-

han lebih maju tertumpu pada suksesi Pemilukada Medan. Harapan itu akan terjawab, ketika kinerja wali kota terukur, modern dan populis, sehingga menciptakan dorongan mencapai tujuan, memperkuat kohesi sosial sekaligus memobilisasi kerja kolektif secara efektif.

Pertama, menjadikan kota Medan sebagai kota cerdas adalah ekspektasi besar dari masyarakat kota ini kepada wali kota ke depan. Mau tidak mau konsep ini harus menjadi ruh kepemimpinan wali kota. Kota cerdas merupakan parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital dalam pelayanan masyarakat, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi serta untuk terlibat lebih aktif dengan warganya. Kota cerdas yang mulanya merupakan gagasan Institut Teknologi Bandung dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dapat turut menjadi solusi dari kerunyaman kota Medan—diarahkan kepada tiga indikator, yakni; cerdas ekonomi, cerdas sosial (keamanan – kenyamanan) dan cerdas lingkungan masyarakat.

Cerdas ekonomi dimaksudkan adalah, wali kota terpilih harus dapat menciptakan perekonomian kota Medan lebih baik, kota bebas pengangguran, dinamis dan tingkat kemiskinan menurun seiring pendapatan perkapita ekonomi masyarakat meningkat—dengan memaksimalkan sumber daya yang ada atau potensi kota seperti layanan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola dan peran sumber daya manusia (SDM).

Cerdas sosial (keamanan - kenyamanan) adalah, kota Medan dijadikan sebagai kota aman, tidak ada kekerasan yang menimbulkan keresahan, masyarakat terlindungi dari segala gangguan bentuk kejahatan. Kota Medan bukanlah basis kejahatan, seperti Narkoba, geng motor, begal dan lainnya, tetapi kota damai, aman dan memberikan kenyamanan interaksi masyarakatnya ataupun dengan pemerintah kota. Begitu pula cerdas lingkungan masyarakat, kota Medan harus dijadikan area masyarakat layak huni, tempat yang sehat, tata kota menarik, taman kota yang indah, transpor yang baik, hemat energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta peran SDM yang baik.

Kedua, terbangunnya semangat keagamaan di tengah keberagaman agama dan multikultural. Semangat keagamaan menjadi potensi terbentuknya masyarakat madani (*civil society*). Meskipun untuk mengaktualisasikan



secara menyeluruh masih menempuh jalan panjang, tetapi semangat ini sudah terbangun dalam kerukunan umat beragama-antar umat beragama dan harmonisasi antar keberagaman kelompok-organisasi. Wali kota harus dapat berdiri di tengah keberagaman kelompok etnis, bahasa daerah, adat istiadat, seni budaya, agama, dan organisasi. Kemudian membentuk keberagaman menjadi keteraturan hidup, menghormati perbedaan, berkeadilan sosial dan sejahtera tanpa ada tekanan kepentingan lain. Realitas ini menjadi kekuatan daerah, membentuk Medan kota harmonis dan beradab.

Ketiga, terbentuknya birokrasi pemerintahan terbaik sebagai pelayan publik, juga menjadi kerinduan masyarakat terhadap wali kota terpilih. Kompetensi pejabat publik, menentukan mendukung manajerial birokrasi pemerintahan serta implikasinya kepada pelayanan publik. Wali kota dalam menempatkan pejabatnya harus didasarkan kompetensi, bukan karena primordialisme dan kolegalisme. Dari proses inilah meritokrasi pemerintahan diharapkan bisa terwujud. Artinya pejabat dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terpilih adalah peja-

bat terbaik, dilihat dari kapasitas, kredibilitas, integritas. Sehingga mampu mengimplementasikan program pemerintah, serta mampu berkomunikasi dan mengadopsi aspirasi masyarakat setiap memecahkan problem sosial.

Ekspektasi pikiran di atas, akan terwujud ketika partisipasi masyarakat sebagai pemilih semakin cerdas menentukan wali kotanya. Rekam jejak para calon menjadi penilaian utama atas kompetensinya. Berpikir, bertindak nyata dilakukan oleh kandidat wali kota di tengah masyarakat harus menjadi dasar perhatian awal. Paling tidak mereka sudah berbuat sebelum terpilih. Mengimplementasikan harapan di atas, tidaklah sulit dilakukan bagi wali kota terpilih, karena dukungan potensi yang ada. SDM berkualitas dan masyarakat merupakan aset penting. Gagasan di atas bukan hal baru, kemungkinan telah menjelma menjadi gerakan bersama setiap daerah di Indonesia yang juga menjadi inspirasi, motivasi dan pembanding bagi kota Medan.

Penulis adalah Ketua Jufusan BPI FD&K - UIN Sumatera Utara & Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut.